



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 19831-19837

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Peran Guru sebagai Teladan Dalam Penanaman Nilai Anti Korupsi di Lingkungan Sekolah

Muhammad Fauzi, Ahmad Mahfud Taufiq, Muhammad Nasrullah

Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam At-Taqwa Bondowoso

muhammadfauzi141003@gmail.com, fuetkik@gmail.com, muhammadnasrulnasrul71345@gmail.com

Abstrak

Pendidikan antikorupsi merupakan strategi preventif yang penting untuk membentuk generasi berintegritas sejak lingkungan sekolah. Dalam proses tersebut, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai teladan moral yang perilaku sehari-harinya diamati dan ditiru oleh peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran guru sebagai teladan dalam penanaman nilai antikorupsi di sekolah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan tantangan penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap artikel ilmiah, buku, pedoman pendidikan, dan dokumen kelembagaan yang relevan. Data dianalisis menggunakan analisis isi untuk menemukan pola konseptual dan temuan empiris mengenai keteladanan, integrasi nilai dalam pembelajaran, budaya sekolah, dan kolaborasi dengan keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsistensi guru dalam menunjukkan kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, keadilan, transparansi, dan keberanian mengakui kesalahan menjadi fondasi utama pembentukan karakter antikorupsi siswa. Efektivitasnya semakin kuat ketika nilai antikorupsi diintegrasikan ke berbagai mata pelajaran, dibiasakan melalui budaya sekolah, serta didukung oleh keterlibatan kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan guru, keterbatasan pemahaman pendidik, lemahnya kebijakan internal, dan budaya permisif terhadap ketidakjujuran kecil. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan, evaluasi keteladanan, penguatan tata kelola sekolah yang transparan, dan sinergi antarlingkungan pendidikan agar penanaman nilai antikorupsi berlangsung konsisten, kontekstual, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keteladanan Guru, Antikorupsi, Karakter, Pendidikan

1. Latar Belakang

Korupsi masih menjadi masalah sistemik di Indonesia yang tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga menghancurkan moral masyarakat. Pendidikan anti korupsi menjadi strategi preventif yang harus dilakukan sejak dini, terutama melalui sekolah. Pada jenjang ini, guru memainkan peran sentral sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan yang perilakunya dapat memengaruhi karakter siswa secara langsung maupun tidak langsung. (Rijal, 2023).

Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum. Pendidikan menjadi strategi preventif yang sangat penting, terutama pendidikan karakter dan nilai sejak sekolah dasar hingga menengah. Pendidikan anti korupsi (PAK) di sekolah bertujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, disiplin, dan keadilan yang menjadi fondasi pembentukan warga negara yang berintegritas (Kesuma dkk., 2025).

Guru bukan sekadar penyampai pengetahuan, melainkan figur yang diamati dan ditiru oleh peserta didik. Oleh karena itu, perilaku guru dalam keseharian baik dalam pembelajaran maupun interaksi sosial berpengaruh besar pada keberhasilan penanaman nilai anti korupsi. Artikel ini membahas peran guru sebagai teladan dengan menyandingkan teori dan hasil penelitian dalam satu bagian analitis yang terpadu.

Sebagai lingkungan pendidikan formal, sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik. Pembiasaan, interaksi sosial, dan kultur sekolah secara langsung mempengaruhi perkembangan moral siswa. Dalam konteks ini, guru merupakan sosok sentral karena memiliki fungsi sebagai pendidik, pembimbing, pengajar, dan juga teladan. Berdasarkan teori belajar sosial, peserta didik belajar melalui observasi dan meniru perilaku yang mereka lihat setiap hari. Karena itu, perilaku guru baik dalam proses pembelajaran maupun interaksi sosial akan sangat menentukan bagaimana siswa membangun nilai kejujuran dan integritas (Wijayanti & Sunarto, 2024).

Namun, implementasi pendidikan antikorupsi tidak selalu berjalan efektif. Beberapa penelitian menunjukkan tantangan seperti ketidakkonsistenan keteladanan guru, terbatasnya pemahaman guru terhadap pendidikan antikorupsi, lemahnya budaya sekolah, dan kurangnya keterlibatan orang tua dalam penguatan nilai integritas (Pahlevi & Fahmi, 2023).

Di sisi lain, penelitian lain menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat—melalui keteladanan guru, integrasi materi dalam pembelajaran, pembiasaan nilai dalam budaya sekolah, dan kolaborasi antara sekolah dan keluarga—mampu meningkatkan perilaku antikorupsi siswa secara signifikan (Rizki & Sumardjoko, 2023).

Dengan demikian, peran guru sebagai teladan menjadi aspek yang sangat krusial dalam pendidikan antikorupsi. Guru tidak hanya mengajarkan konsep tentang korupsi, tetapi juga menjadi figur nyata yang menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam kegiatan sehari-hari. Keteladanan ini menjadi kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter siswa.

Pendahuluan dalam artikel ini menegaskan bahwa pendidikan anti korupsi di sekolah tidak dapat dilepaskan dari peran guru sebagai figur sentral dalam pembentukan karakter peserta didik. Meskipun nilai-nilai anti korupsi telah banyak dirumuskan dalam kebijakan dan kurikulum pendidikan, implementasinya di lapangan sering kali belum berjalan optimal karena kurangnya keteladanan yang konsisten dari pendidik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pendidikan anti korupsi dan praktik nyata di lingkungan sekolah.

Lebih lanjut, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai aktor moral yang perilaku sehari-harinya diamati dan ditiru oleh peserta didik. Dalam konteks ini, keteladanan guru memiliki posisi strategis sebagai sarana internalisasi nilai anti korupsi yang bersifat implisit namun berpengaruh kuat. Ketika guru mampu menunjukkan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab secara konsisten, nilai-nilai tersebut akan lebih mudah tertanam dalam kesadaran siswa dibandingkan dengan penyampaian konsep secara teoritis semata.

Oleh karena itu, kajian mengenai peran guru sebagai teladan dalam penanaman nilai anti korupsi menjadi penting untuk memperkuat landasan konseptual pendidikan karakter di sekolah. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas posisi keteladanan guru sebagai faktor kunci keberhasilan pendidikan anti korupsi, sekaligus menjadi pijakan bagi pengembangan praktik pendidikan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis artikel jurnal nasional yang relevan. Sumber literatur dipilih berdasarkan kesesuaian tema, keterbaruan, dan kredibilitas. Data dianalisis menggunakan analisis isi untuk menemukan pola teoretis dan temuan empiris yang dapat dipadukan dalam pembahasan.

Pemilihan metode studi literatur dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran guru sebagai teladan dalam pendidikan anti korupsi. Isu keteladanan guru dan pendidikan karakter telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian sebelumnya, sehingga pendekatan studi literatur memungkinkan penulis untuk mengintegrasikan beragam perspektif teoretis dan temuan empiris yang relevan ke dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Melalui analisis isi, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data sekunder, tetapi juga pada penafsiran makna dan kecenderungan temuan yang muncul dari berbagai sumber. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi pola-pola umum, tantangan, serta strategi efektif dalam implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah. Dengan demikian, metode yang digunakan mendukung tujuan penelitian untuk menyajikan pembahasan yang bersifat analitis dan reflektif, bukan sekadar deskriptif, serta memperkuat validitas argumentasi yang dibangun dalam artikel ini.

3. Hasil dan Diskusi

A. Keteladanan Guru sebagai Fondasi Pendidikan Anti Korupsi

Secara teoretis, keteladanan merupakan konsep fundamental dalam pendidikan karakter. Bandura menyatakan bahwa manusia belajar melalui observasi dan imitasi. Siswa lebih banyak menginternalisasi nilai melalui perilaku yang mereka lihat dibandingkan materi yang mereka dengarkan.

Temuan penelitian memperkuat teori ini. Penelitian Wijayanti & Sunarto (2024) menunjukkan bahwa guru yang konsisten menunjukkan perilaku jujur, adil, tegas, dan disiplin mampu meningkatkan perilaku positif siswa, terutama dalam konteks antikorupsi. Guru menjadi “cermin moral” yang menentukan cara siswa memahami nilai integritas.

Keteladanan tercermin melalui:

- a. kedisiplinan dalam hadir dan mengajar,
- b. transparansi dalam memberikan penilaian,
- c. tidak melakukan diskriminasi terhadap siswa,
- d. berani mengakui kesalahan,
- e. tidak mengambil keuntungan pribadi dari fasilitas sekolah.

Ketika guru tidak konsisten, siswa justru mengalami disonansi moral, sehingga pendidikan antikorupsi tidak efektif.

Menurut Bandura (1977), melalui teori pembelajaran sosial, peserta didik cenderung meniru perilaku individu yang dianggap memiliki otoritas dan kedekatan emosional, termasuk guru. Oleh karena itu, sikap guru yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan akan lebih efektif membentuk karakter anti korupsi siswa dibandingkan sekadar penyampaian materi secara teoritis. Hal ini sejalan dengan pandangan Lickona (2012) yang menegaskan bahwa pendidikan karakter akan berhasil apabila nilai moral diajarkan sekaligus dicontohkan dalam praktik nyata oleh pendidik.

Pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan menuntut adanya keteladanan dalam setiap aspek profesionalisme guru, seperti transparansi dalam penilaian, keadilan dalam memperlakukan siswa, serta konsistensi antara ucapan dan tindakan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2019) menegaskan bahwa pendidikan anti korupsi harus diintegrasikan melalui budaya sekolah dan perilaku pendidik yang berintegritas. Senada dengan hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) menyatakan bahwa keteladanan guru merupakan strategi utama dalam internalisasi nilai anti korupsi, karena siswa belajar secara langsung dari pengalaman dan contoh nyata yang mereka saksikan di lingkungan sekolah.

Dalam konteks pendidikan Islam, keteladanan guru sebagai teladan anti korupsi memiliki dasar normatif yang kuat, karena guru diposisikan sebagai *uswah hasanah* yang bertanggung jawab membentuk akhlak peserta didik. Muhaimin (2015) menjelaskan bahwa pendidikan agama tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembiasaan sikap amanah, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut selaras dengan prinsip anti korupsi dan menjadi bagian penting dalam upaya membangun budaya sekolah yang bersih dan berintegritas, khususnya di madrasah yang menjadikan nilai religius sebagai landasan utama pendidikan.

Keteladanan guru dalam konteks pendidikan anti korupsi tidak hanya berfungsi sebagai contoh perilaku, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan kesadaran moral peserta didik. Nilai-nilai kejujuran dan integritas yang ditampilkan guru secara konsisten akan membentuk persepsi siswa bahwa perilaku tersebut merupakan standar etika yang harus dijunjung tinggi. Dengan demikian, keteladanan guru menjadi fondasi utama yang menentukan arah keberhasilan pendidikan anti korupsi di sekolah.

Selain itu, keteladanan guru berperan sebagai penguat nilai yang bersifat afektif. Siswa cenderung mempercayai dan meniru perilaku guru yang dianggap kredibel dan berintegritas. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan guru, proses internalisasi nilai anti korupsi menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan sikap permisif terhadap ketidakjujuran. Oleh karena itu, konsistensi perilaku guru merupakan syarat mutlak dalam pendidikan anti korupsi.

B. Integrasi Nilai Antikorupsi dalam Pembelajaran

Dalam teori pendidikan nilai, integrasi dilakukan melalui kurikulum eksplisit dan implisit. Kurikulum eksplisit melalui mata pelajaran seperti PPKn, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, atau IPS. Sementara kurikulum implisit melalui interaksi, kebiasaan, dan kegiatan sekolah.

Rizki & Sumardjoko (2023) menemukan bahwa guru yang mengintegrasikan nilai antikorupsi melalui metode pembelajaran aktif seperti studi kasus, debat moral, atau proyek P5 lebih berhasil meningkatkan kesadaran etis siswa. Pembelajaran yang kontekstual membuat siswa memahami dampak korupsi tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga aspek moral dan sosial.

Strategi integrasi yang efektif meliputi:

- a. mengaitkan materi pelajaran dengan isu integritas,
- b. menggunakan contoh nyata kasus korupsi,
- c. melibatkan siswa dalam refleksi nilai,
- d. menerapkan pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning).

Dengan demikian, teori konstruktivisme relevan dalam pendidikan antikorupsi: siswa membangun pemahaman melalui pengalaman bermakna.

Pengintegrasian nilai-nilai anti-korupsi dalam kurikulum sekolah diupayakan dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi di sekolah dengan beberapa alternatif model yang bisa digunakan yaitu model sebagai mata pelajaran tersendiri, model terintegrasi dalam semua mata pelajaran, model di luar pembelajaran, model pembudayaan dan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah dan terakhir model gabungan (Wirabhakti, 2020). Pengintegrasian nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah adalah langkah penting dalam membentuk karakter anti korupsi pada siswa. Kurikulum yang mencakup aspek-etika, integritas, tanggung jawab, dan konsekuensi korupsi membentuk landasan yang kuat untuk karakter pendidikan anti korupsi (Julaeha, 2019). Pada praktiknya, integrasi ini melibatkan penyisipan materi tentang nilai-nilai ini dalam berbagai mata pelajaran. Misalnya, dalam mata pelajaran sejarah, siswa dapat mempelajari dampak negatif korupsi dalam sejarah suatu bangsa, menyelidiki bagaimana tindakan korupsi telah merusak kebijakan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Begitu pula halnya dengan pembelajaran matematika. Di dalam pembelajaran matematika, siswa dapat memahami pentingnya transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan melalui pembelajaran kasus tentang korupsi dalam pengelolaan anggaran publik. wadah untuk pembelajaran kolaboratif di mana siswa saling menginspirasi dan mendorong satu sama lain untuk memperdalam pemahaman mereka tentang masalah yang kompleks ini.

Di dalam konteks diskusi kelompok, siswa juga memiliki kesempatan untuk menggali penyebab dan akar masalah korupsi. Mereka dapat menyelidiki faktor-faktor yang mendorong munculnya tindakan korupsi, baik itu dalam lingkup individu, organisasi, maupun sistem. Dengan memahami akar masalah tersebut, siswa menjadi lebih mampu merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan untuk mengatasi korupsi. Lebih dari itu, diskusi kelompok memungkinkan siswa untuk memahami dampak yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi dalam berbagai konteks, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga skala yang lebih luas seperti di tingkat nasional atau global. Dengan menghadirkan contoh-contoh konkret dan studi kasus yang relevan, siswa dapat melihat secara langsung bagaimana korupsi merugikan individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Atas cara ini, mereka menjadi lebih termotivasi untuk mengambil tindakan yang nyata dalam memerangi korupsi dan memperjuangkan keadilan. Dengan demikian, kelompok diskusi bukan hanya merupakan sarana untuk memperluas pengetahuan siswa tentang korupsi, tetapi juga untuk membentuk sikap kritis, analitis, dan proaktif dalam menghadapi masalah sosial yang kompleks ini. Melalui diskusi kelompok yang terbuka dan terarah, siswa menjadi lebih sadar akan peran mereka sebagai agen perubahan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berintegritas.

Integrasi nilai antikorupsi dalam pembelajaran memperlihatkan bahwa pendidikan anti korupsi tidak harus disampaikan sebagai materi yang terpisah, melainkan dapat ditanamkan melalui berbagai mata pelajaran secara kontekstual. Pendekatan ini membantu siswa memahami bahwa nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan relevan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam proses belajar mengajar.

Pembelajaran yang mengaitkan materi dengan realitas sosial juga mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap praktik ketidakjujuran dan korupsi. Melalui diskusi, studi kasus, dan refleksi nilai, siswa tidak hanya memahami konsep korupsi secara kognitif, tetapi juga mampu menilai dampaknya secara moral dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi nilai antikorupsi dalam pembelajaran berkontribusi pada pembentukan kesadaran etis peserta didik secara lebih mendalam.

C. Pembiasaan dan Budaya Sekolah sebagai Penguat Nilai

Teori ekologi pendidikan Bronfenbrenner menegaskan bahwa lingkungan memengaruhi perkembangan karakter. Sekolah sebagai “mikrosistem” menjadi ruang penting dalam pembentukan perilaku antikorupsi. Penelitian Pahlevi & Fahmi (2023) menunjukkan bahwa budaya sekolah yang menekankan keteraturan, transparansi, dan penghargaan terhadap nilai kejujuran berdampak langsung pada perilaku siswa.

Contoh pembiasaan yang efektif:

- a. pengelolaan uang sekolah yang transparan,
- b. pembiasaan antre,
- c. pemilihan ketua kelas secara demokratis,
- d. tidak menoleransi kecurangan dalam ujian,
- e. reward bagi siswa yang menunjukkan integritas.

Budaya sekolah menjadi “kurikulum tersembunyi” yang tidak tertulis, tetapi sangat memengaruhi perilaku siswa. Jika budaya sekolah tidak mendukung integritas, pendidikan antikorupsi akan kehilangan makna.

Deal dan Peterson (1999) mendefinisikan budaya sekolah sebagai sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah (<http://kikyuno.wordpress.com>).

Berdasarkan pedoman pelaksanaan pendidikan karakter (berdasarkan pengalaman di suatu pendidikan rintisan), pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar di lakukan melalui kegiatan pengembangan diri yaitu:

1. Kegiatan rutin

Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan siswa secara terus menerus dan konsisten setiap saat Misalnya, kegiatan upacara hari senin, upacara kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan, piket kelas, shalat berjamaah, berbaris ketika masuk kelas, berdoa sebelum pelajaran dimulai dan diakhiri, dan mengucapkan salam apabila bertemu guru, tenaga pendidik, dan teman.

2. Kegiatan spontan

Kegiatan yang dilakukan siswa secara spontan pada saat itu juga, misalnya, mengumpulkan sumbangan ketika ada teman yang terkena musibah atau sumbangan untuk masyarakat ketika bencana.

3. Keteladanan

Keteladanan merupakan perilaku, sikap guru, tenaga kependidikan dan siswa dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi siswa lain. Misalnya nilai disiplin (kehadiran guru yang lebih awal dibanding siswa), kebersihan, kerapian, kasih sayang, kesopanan, perhatian, jujur dan kerja keras dan percaya diri

4. Pengkondisian
Pengkondisian yaitu penciptaan kondisi yang mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter, misalnya kebersihan badan dan pakaian, toilet bersih, tempat sampah, halaman yang hijau dengan pepohonan, poster kata-kata bijak di sekolah dan di dalam kelas.

Budaya sekolah berfungsi sebagai lingkungan yang secara tidak langsung membentuk kebiasaan dan karakter peserta didik. Pembiasaan nilai-nilai anti korupsi melalui aktivitas sehari-hari di sekolah menjadikan integritas sebagai bagian dari perilaku yang wajar dan diharapkan. Dalam konteks ini, budaya sekolah berperan sebagai kurikulum tersembunyi yang memperkuat nilai-nilai yang telah diajarkan dalam pembelajaran formal.

Ketika sekolah secara konsisten menerapkan prinsip kejujuran, kedisiplinan, dan transparansi, siswa akan lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, budaya sekolah yang permisif terhadap pelanggaran kecil dapat melemahkan pesan moral pendidikan anti korupsi. Oleh karena itu, pembiasaan dan budaya sekolah menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan pendidikan anti korupsi.

D. Kolaborasi Guru, Orang Tua, dan Masyarakat dalam Penguatan Nilai

Teori pendidikan karakter modern menekankan pentingnya kerja sama lintas lingkungan. Pendidikan antikorupsi memerlukan dukungan dari keluarga dan masyarakat agar nilai yang ditanamkan di sekolah tidak bertentangan dengan praktik di rumah.

Kesuma dkk. (2025) membuktikan bahwa sekolah yang melibatkan orang tua dalam komunikasi nilai, pelatihan, dan kegiatan sekolah cenderung sukses dalam membentuk karakter siswa.

Kolaborasi dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan orang tua berkala,
- b. penyamaan persepsi tentang disiplin,
- c. program sekolah ramah integritas,
- d. kegiatan sosial kemasyarakatan bersama.

Dengan kolaborasi yang kuat, internalisasi nilai antikorupsi berlangsung secara berkesinambungan dan tidak berhenti di lingkungan sekolah.

Kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat nilai anti korupsi yang ditanamkan di sekolah. Nilai yang diajarkan di ruang kelas memerlukan penguatan di lingkungan keluarga dan masyarakat agar tidak terjadi kontradiksi dalam pengalaman sosial peserta didik. Sinergi ini membantu menciptakan keselarasan nilai antara sekolah dan lingkungan luar.

Melalui komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan, orang tua dan masyarakat dapat berperan sebagai mitra sekolah dalam menanamkan nilai integritas. Keterlibatan berbagai pihak ini menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas guru semata. Dengan demikian, internalisasi nilai anti korupsi dapat berlangsung secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

E. Tantangan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan:

- a. Ketidakkonsistenan guru dalam bertindak.
- b. Pemahaman konsep antikorupsi yang belum merata.
- c. Budaya sekolah yang masih permisif terhadap ketidakjujuran kecil.
- d. Minimnya program pelatihan guru tentang pendidikan karakter.
- e. Kurangnya dukungan orang tua dalam penguatan nilai.

Tantangan ini menunjukkan perlunya sistem yang lebih kuat, bukan hanya berbasis individu guru, tetapi didukung oleh manajemen sekolah dan kebijakan pendidikan.

Tantangan dalam implementasi pendidikan anti korupsi menunjukkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh komitmen seluruh warga sekolah. Ketidakkonsistenan perilaku pendidik, lemahnya budaya sekolah, serta keterbatasan pemahaman tentang pendidikan anti korupsi dapat menghambat proses internalisasi nilai pada peserta didik.

Selain itu, kurangnya dukungan sistemik, seperti pelatihan guru dan kebijakan sekolah yang berpihak pada nilai integritas, turut menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Tantangan-tantangan ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga pendidikan anti korupsi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik pendidikan sehari-hari.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran sentral sebagai teladan dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekolah. Keteladanan guru, integrasi nilai antikorupsi dalam pembelajaran, pembiasaan melalui budaya sekolah, serta kolaborasi dengan orang tua merupakan faktor penting dalam membentuk karakter siswa yang jujur dan berintegritas. Namun, implementasi pendidikan antikorupsi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakkonsistenan perilaku guru dan lemahnya budaya sekolah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran guru dan sistem sekolah secara berkelanjutan agar pendidikan antikorupsi dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran yang sangat strategis sebagai teladan dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekolah. Keteladanan guru menjadi fondasi utama dalam pendidikan antikorupsi karena peserta didik lebih mudah menginternalisasi nilai melalui perilaku nyata yang mereka amati dalam keseharian dibandingkan melalui penyampaian materi secara verbal semata. Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam proses pembelajaran, pembiasaan melalui budaya sekolah yang berorientasi pada kejujuran dan transparansi, serta kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat terbukti menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam membentuk karakter siswa yang berintegritas. Pendidikan antikorupsi tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan harus didukung oleh sistem sekolah yang konsisten dan lingkungan yang kondusif. Namun demikian, implementasi pendidikan antikorupsi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakkonsistenan perilaku guru, keterbatasan pemahaman terhadap konsep pendidikan antikorupsi, lemahnya budaya sekolah, serta minimnya keterlibatan orang tua. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran guru melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan budaya sekolah yang berintegritas, serta sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, pendidikan antikorupsi di sekolah diharapkan mampu membentuk generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan berkarakter kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan bermasyarakat.

Referensi

1. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
2. Juliaha, S. (2019). Problematika Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 157. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i2.367>
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Kemendikbud.
4. Kesuma, R. P., Sakinah, A., & Marsyanda, Z. N. (2025). *Peran Guru Sebagai Garda Utama Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Sekolah*. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*.
a. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4396>
5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Satuan Pendidikan*. Jakarta: KPK.
6. Lickona, T. (2012). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
7. Muhaimin. (2015). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
8. Pahlevi, P., & Fahmi, I. (2023). *Peran Tenaga Pendidik Dalam Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi di Sekolah Menengah Atas*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1). <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/2411>
9. Rijal, F. K. (2023). *Penanaman Kurikulum Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Sekolah*. At-Tarbawi: *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan*. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/3949>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5349>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

10. Rizki, W. P., & Sumardjoko, B. (2023). *Peran Guru PPKn dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi pada Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas*. Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/didaktika/article/view/11339>
11. Wijayanti, N. S., & Sunarto. (2024). *Peran Guru Pendidikan Pancasila dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi pada Siswa di SMP Negeri 17 Semarang*. Unnes Civic Education Journal (UCEJ). <https://journal.unnes.ac.id/journals/ucej/article/view/14989>
12. Wirabhakti, A. (2020). Integrasi Nilai Anti Korupsi dalam Kurikulum Sekolah dengan Pendekatan Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 173-183.
13. Hidayah, N. P., & Esfandiari, F. (2022). Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi pada Siswa Sekolah Dasar di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 5(1), 77-88. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53774>
14. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2019). *Implementasi Pendidikan Antikorupsi bagi Guru SMP*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
15. Kristiono, N., Astuti, I., & RafiUddin, H. (2020). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pemalang. *Integralistik*, 31(1), 13-21. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v31i1.21618>
16. Rasdi, R., Arifin, R., Widyawati, A., Adiyatma, S. E., & Ilyasa, R. M. A. (2021). When Students Fight Corruption: A Portrait of Anti-Corruption Education for Elementary School Students. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(1), 111-124. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i1.42291>